

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adi,Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Ali Mahrus, Asas, Teori& Praktek HUKUM PIDANA KORUPSI (Yogyakarta: Uii Press,2013),

\_\_\_\_\_, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Cetakan Pertama, Sinar Grafika,Jakarta,2011)

Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materil dan Formil KORUPSI di INDONESIA, (Malang, Jawa Timur:Bayumedia, 2005).

Danil, H. Elwi, KORUPSI : konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Fuadi, Munir METODE RISET HUKUM: PENDEKATAN TEORI DAN KONSEP (DEPOK :PT. Raja Grafindo Persada,2018).

Hamzah, Andi, Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2007).

\_\_\_\_\_, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keenam, 2000).

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta :Sinar Grafika,2007)

Harkrisnowo, Harkristuti, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan terhadap Proses Legalitas dan Pemidanaan di Indonesia”, Majalah KHN Newsletter, Jakarta, Edisi April,halaman 28.

Karuasudirdja, H Eddy Djunaedi, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, (Jakarta:-,1983)

Kadir,Abdul Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004).

Luthan,Salman, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Disertasi, Universitas Indonesia,Jakarta,2007)

Madril,Oce, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi rekam jejak persidangan kasus korupsi dari Banda Aceh sampai Jayapura, (Jakarta: PJKAKI KPK,2018)

Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Muhammad, Rusli, Lembaga Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta:UII Press,2013)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni,1984)

\_\_\_\_\_, “ Teori-teori dalam kebijakan Hukum Pidana” (Bandung:Alumni,2005)

\_\_\_\_\_, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang, penerbit Undip)

Mulyadi, Lilik, Seraut Wajah PUTUSAN HAKIM dalam HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA : perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya,(Jakarta: PT. Cipta Aditya Bakti,2014)

Mochtar,M. Akil Memberantas Korupsi (Jakarta:Q-Communication, 2006)

Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara,2003).

Nawawi, Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, PT. Citr Aditya Bakti,2005).

\_\_\_\_\_, Hukum Pidana Lanjut ( Semarang: FH Undip, 2012)

Projodikoro,Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2012)

Pujiyono , Tindak Pidana Korupsi, ( Banten : Universitas Terbuka ,2017)

Putra,M. Roby Perdana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Disparitas Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim,(Prosiding Ilmu Hukum Gelombang ke-2, Universitas Islam Bandung,2015-2016).

Soedarto, Hukum Pidana I, (Semarang: penerbit Undip)

\_\_\_\_\_,Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung :Alumni, 1986)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984)

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)

Soeroso,R, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2011)

Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, Kedua, 2003,)

Zen, Abdullah, Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya dalam Upaya Resosialisasi narapidana, (Yogyakarta, Hasta Cipta Mandiri,2009)

#### **JURNAL**

Nicolas Hany. 2015. Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 10(1)

Adrian Pah ,Gress Gustia, dkk. 2014. Analisis Yuridis Penjatuhpidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011). e-Journal

Lentera Hukum, I (1): 33-41

#### **ARTIKEL**

Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2014.

<https://infoplus.id/jumlah-perkara-pengadilan-semarang-selama-2018-pidana-biasa-melonjak-perkara-korupsi-turun/>, diakses tanggal 9 januari 2019

<http://prakoso17.blogspot.com/2013/04/aliran-klasik-aliran-moderen-aliran-neo.html?m=1> diakses pada tanggal 14 Maret 2019 , pukul 16.50 WIB.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.23 WIB.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Rancangan Undang-Undang KUHP 2012

### **PUTUSAN**

1. Putusan Nomor 5/ Pid.sus-TPK/2016/PN.Smg
2. Putusan Nomor 48/ Pid.sus-TPK/2016/PN.Smg
3. Putusan Nomor 77/ Pid.sus-TPK/2016/PN.Smg
4. Putusan Nomor 78/ Pid.sus-TPK/2016/PN.Smg

## WAWANCARA

1. Heru Sungkowo, Wawancara, Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, (Semarang : 20 Februari, 2019)
2. Andi Risa Jaya, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang, 28 Maret 2019)



**LAMPIRAN**

